

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, memberikan fleksibilitas kepada desa untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu wujud nyata dari otonomi daerah di tingkat desa, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi lebih pada upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, meningkatkan kesejahteraan, dan mengambil alih kendali atas kehidupan mereka. Pemberdayaan yang sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sangat penting agar hasilnya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Ketika masyarakat terlibat, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif,

pemberdayaan masyarakat desa dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perubahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Suharto, 2009).

Di sisi lain, sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen utama dalam keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut. Manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Tanpa kehadiran manusia, organisasi tidak akan mampu hidup, tumbuh, dan berkembang. Kedua, perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya agar mampu mengantisipasi semua perkembangan. Dengan demikian, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk daerahnya (Ife dan Frank, 2008).

Kepemimpinan seorang kepala desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya mencakup bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusannya. Sebagai pemimpin, seorang kepala desa bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur desa. Namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepemimpinan kepala desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, mengingat masih banyak masyarakat desa di Indonesia yang belum mandiri.

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan memimpin organisasi pemerintahan desa, kepala desa juga diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin yang efektif dalam berkomunikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Tujuan dari hal ini adalah agar pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat sangatlah penting. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan aktivitas masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peran kepala desa dalam memimpin masyarakat, maka diperlukan sosok pemimpin yang berkualitas (Dwiyanto, 2006).

Proses kepemimpinan dan proses pemberdayaan masyarakat desa yaitu salah satu kewenangan kepala desa terkait pembagian urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 4 Nomor 21 yakni pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat banyak sekali, banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk membuat masyarakat lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih berdaya dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat terutama masyarakat desa. Dari banyaknya upaya tersebut, kepala desa memegang peran penting dalam kaitannya dengan keberhasilan proses pemberdayaan.

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kemampuan, kreativitas, kompetensi, serta daya pikir dan tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Program pemberdayaan masyarakat tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka secara mandiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di berbagai bidang dan sektor kehidupan. Secara garis besar, pemberdayaan masyarakat adalah proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang mandiri dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupan mereka (Afriansyah, 2023).

Desa Ajang Pulu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang terdiri dari 3 dusun yakni Calo 1, Calo 2, dan Belawae. Desa Ajang Pulu memiliki penduduk dengan jumlah sebanyak 1.028 jiwa yang terbagi dalam 231 kepala keluarga. Secara geografis, Desa Ajang Pulu berbatasan dengan

Desa Letta Tanah di sebelah utara, Desa Taddang Palie di sebelah selatan, dan Desa Maroanging di sebelah timur. Mayoritas penduduk Desa Ajang Pulu menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan subur untuk bercocok tanam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor tersebut dalam menopang perekonomian desa.

Dalam hal fasilitas, sektor pertanian di Desa Ajang Pulu masih menghadapi keterbatasan jika dibandingkan dengan standar pertanian modern. Meskipun telah menggunakan *tractor* dan *combine harvester* untuk pengolahan tanah dan proses pemanenan padi, fasilitas lain seperti mesin semprot, mesin pemupukan, mesin tanam, dan peralatan modern lainnya masih sangat minim. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bercocok tanam. Padahal, dengan penerapan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mekanis untuk pengolahan tanah atau sistem otomatisasi dalam pemupukan, hasil pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas penunjang agar sektor pertanian di Desa Ajang Pulu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Pemerintah Desa Ajang Pulu, 2025).

Dalam hal ekonomi, tingkat kemiskinan di desa Ajang Pulu cukup mengalami penurunan. Hampir 99% mata pencaharian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem tanam padi yang memungkinkan dua kali musim panen dalam setahun. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan periode setelah panen padi dengan menanam semangka, terutama pada akhir tahun. Inisiatif ini menjadi salah satu strategi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebelumnya, pola tanam semangka ini belum dilakukan, namun kini menjadi salah satu langkah inovatif yang mendukung pendapatan tambahan bagi petani. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola sektor pertanian khususnya pada komoditas padi, juga terlihat dari stabilnya harga jual yang cenderung menguntungkan. Dampak positif dari perkembangan sektor pertanian ini dapat diamati melalui peningkatan taraf hidup

masyarakat, seperti bertambahnya jumlah rumah permanen (rumah batu) dan kepemilikan kendaraan pribadi oleh warga setempat. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut.

Meskipun sektor ekonomi masyarakat Desa Ajang Pulu mengalami perkembangan, data kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang masih perlu diatasi. Berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan dana desa telah digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan dalam penentuan penerima manfaat seringkali muncul akibat tidak akuratnya data kemiskinan. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial seringkali tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi riil di lapangan. Dalam hal inilah, kepala desa sudah seharusnya melakukan upaya atas permasalahan tersebut sehingga program-program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan berdampak signifikan untuk masyarakat.

Ketersediaan lahan di Desa Ajang Pulu juga menjadi salah satu isu mendesak yang memerlukan perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan lahan dalam dana desa karena pengadaan lahan tidak termasuk dalam cakupan prioritas penggunaannya. Upaya untuk pengadaan lahan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) juga terkendala, mengingat Alokasi Dana Desa bersumber dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran dan alokasi yang ketat. Situasi ini menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam merencanakan dan merealisasikan program-program yang memerlukan pengadaan lahan sebagai prasyarat.

Melihat pentingnya gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga banyak penelitian terkait hal tersebut. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Relevansi
1.	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	Nur Aula Safitri	Strategi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan teori 5P.	Kepemimpinan Kepala Desa Pangkah Kulon dalam pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik melalui penerapan teori pemberdayaan 5P: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kepala desa telah memberikan pelatihan, dukungan, dan berbagai bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan sektor masyarakat seperti petani, nelayan, ibu-ibu produktif, dan pemuda.	- Perbedaan : Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan 5P, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori gaya kepemimpinan menurut Gatto. - Relevansi : Keduanya sama-sama meneliti peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun dengan pendekatan teori yang berbeda.

				Namun, ada kendala diskriminasi terhadap kelompok tani tanpa lahan yang belum sepenuhnya mendapatkan akses pada program pemberdayaan. Keberhasilan program ini juga didukung oleh kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi terkendala pada aspek modal dan pemasaran produk hasil pemberdayaan.	
2.	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato,	Yisriyanto Ismail dan Dikson Junus	Gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire dalam pelaksanaan program pemberdayaan.	Kepala Desa Bilato menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire, memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.	- Perbedaan : Penelitian ini menekankan gaya demokratis dan laissez-faire, sementara penelitian penulis menggunakan empat gaya kepemimpinan menurut Gatto.

	Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo			Program pemberdayaan yang dijalankan mencakup pembangunan fisik seperti jalan tani dan drainase, serta program non-fisik seperti pelatihan perangkat desa dan pemberdayaan ekonomi. Namun, terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan fasilitas dan peralatan pendukung. Meskipun demikian, kepala desa terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi yang lebih inklusif. Keberhasilan	- Relevansi : Sama-sama membahas gaya kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan konteks dan pendekatan gaya yang berbeda.
--	--	--	--	--	--

				pemberdayaan bergantung pada sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang masih memerlukan peningkatan partisipasi serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.	
3.	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)	Mukhamad Fathoni, Suryadi, dan Stefanus Pani Rengu	Peran kepala desa dalam pembangunan fisik desa dengan gaya demokratis.	Kepala desa Denok menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan di Desa Denok masih belum merata, dengan fasilitas desa lebih terpusat di Dusun Denok Krajan	- Perbedaan : Penelitian ini fokus pada pembangunan fisik desa, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. - Relevansi : Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam pembangunan, termasuk

				dibandingkan dengan tiga dusun lainnya. Kepala desa berupaya mengurangi kesenjangan tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, tantangan utama dalam pembangunan adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia yang belum optimal. Kepala desa menjalankan tugasnya dengan melakukan pengarahan, koordinasi, komunikasi,	dalam pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

				pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap program pembangunan. Meskipun kepala desa berusaha mendorong partisipasi masyarakat, masih ada kendala dalam pemerataan pembangunan di seluruh dusun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Denok.	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Diolah oleh Penulis

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinanannya.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang akan di kerjakan serta bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Hasibuan, 2017). Menurut Anoraga (dalam Sandra et al., 2023) yang berpendapat hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu.

Menurut Wahjosumidjo (2012), kepemimpinan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat - sifat tertentu yang meliputi kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*). Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan dipandang sebagai proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi (Wahjosumidjo, 2012). Sementara itu, menurut Miftah Thoha (2010), kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang kompleks melibatkan

pengaruh, komunikasi, dan tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi pertumbuhan individu dan kelompok. Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan akan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain menuju pencapaian tujuan organisasi melalui visi, komunikasi, dan hubungan interpersonal yang efektif.

1.2.2 Gaya Kepemimpinan

Menurut Hasibuan (2017), gaya kepemimpinan adalah metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja, kepuasan kerja dan produktivitas karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Rivai dan Mulyadi (dalam Akbar et al., 2022), gaya kepemimpinan yaitu serangkaian pola yang dilakukan oleh seorang pemimpin baik yang terlihat maupun tidak terlihat dalam memberikan pengaruh kepada bawahannya. Menurut Gatto (dalam Salusu, 1996), gaya kepemimpinan terbagi atas 4 yaitu :

1. Gaya kepemimpinan direktif, adalah gaya kepemimpinan yang semua kekuasaan berada di tangan pemimpin. Pada umumnya, Pemimpin yang direktif tidak hanya terlibat dalam membuat keputusan penting tetapi juga terlibat dalam melaksanakan keputusan tersebut. Semua tugas dijalankan oleh pemimpin, dan orang lain memiliki sedikit kebebasan untuk bertindak. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan ini bersifat otoriter. Adapun indikatornya : 1) Pemimpin memberikan pengarahan dengan petunjuk yang jelas, 2) Pemimpin memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan kepada bawahannya, 3) Pemimpin melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
2. Gaya kepemimpinan konsultatif, adalah gaya kepemimpinan yang memberikan banyak pengarahan sekaligus dukungan kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari bawahan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan dan pengarahan pemimpin. Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih banyak berkonsultasi,

memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasehat dalam rangka pencapaian tujuan. Jika dilihat dari karakteristiknya, kepemimpinan konsultatif memiliki tingkat pengarahan dan dukungan yang sama-sama tinggi. Dengan demikian, pemimpin tetap aktif dalam memberikan arahan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, pemimpin dalam gaya ini sudah mulai menerapkan komunikasi dua arah dengan berupaya mendengarkan pendapat dan saran dari bawahan. Adapun indikatornya: 1) Pemimpin memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahannya dengan cara yang kolaboratif, 2) Pemimpin berkonsultasi dengan bawahan dalam pengambilan keputusan, 3) Pemimpin membangun komunikasi yang interaktif dan dua arah dengan para bawahannya, 4) Pemimpin tidak menerapkan kontrol yang ketat atau otoriter terhadap bawahannya.

3. Gaya kepemimpinan partisipatif, adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kepercayaan kepada staf untuk menyelesaikan tugas mereka dan membuat keputusan. Pemimpin juga mendorong partisipasi staf dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif didasarkan pada gaya konsultatif, di mana pemimpin berkonsultasi dengan staf sebelum membuat keputusan. Namun, dalam gaya partisipatif, pemimpin memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada staf dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan sendiri. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberikan dorongan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin juga memberikan perhatian kepada kelompok dan memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Adapun indikatornya: 1) Pemimpin selalu melibatkan masyarakat, 2) Pemimpin bekerja sama dengan bawahan dalam pengambilan keputusan, 3) Pemimpin memberikan dukungan kepada bawahan dalam menghadapi tantangan dan pemecahan masalah yang muncul selama pelaksanaan program.

4. Gaya kepemimpinan delegatif, juga dikenal sebagai gaya *free-rein* atau *laissez-faire*, adalah gaya kepemimpinan dimana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada staf untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Dalam gaya ini, interaksi dan kontrol dari pemimpin sangat minim, sehingga staf memiliki otonomi yang besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Gaya kepemimpinan ini mendorong staf untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengambil inisiatif, merencanakan, dan melaksanakan pekerjaan mereka sendiri. Pemimpin berperan sebagai sumber daya yang tersedia jika diperlukan, tetapi tidak secara aktif mengarahkan atau mengawasi pekerjaan staf. Penting untuk dicatat bahwa gaya delegatif hanya dapat berjalan efektif jika staf memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, kepercayaan diri yang kuat, dan motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam situasi yang tepat, gaya kepemimpinan delegatif dapat memberdayakan staf, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mandiri dan bertanggung jawab. Namun, penting bagi pemimpin untuk tetap memantau kemajuan tim dan memberikan dukungan jika diperlukan, serta memastikan bahwa staf tetap selaras dengan visi dan misi organisasi. Adapun indikatornya: 1) Pemimpin memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dengan control yang minim, 2) Pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas tertentu tanpa intervensi yang berlebihan, 3) Pemimpin mendorong bawahan untuk percaya diri dan mandiri, 4) Pemimpin memberikan kewenangan kepada bawahan untuk menentukan cara pelaksanaan tugas yang memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif.

1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan

Menurut Kiswanto (dalam Laila NUSCHA, 2016), ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan:

1. Pengetahuan : adalah informasi, pemahaman, dan wawasan yang dimiliki seseorang terhadap suatu bidang atau masalah

tertentu. Bagi seorang pemimpin, pengetahuan sangat penting sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, berkomunikasi, serta menjelaskan tugas kepada bawahan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki, maka semakin baik pula kualitas keputusan dan arah kepemimpinan yang dapat diberikan.

2. Kepribadian: merupakan karakter atau sifat dasar yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kepribadian yang baik, seperti sikap tegas, percaya diri, jujur, dan adil, akan sangat berpengaruh terhadap cara pemimpin memimpin. Kepribadian yang kuat dapat meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan dari bawahan maupun masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kemampuan : merujuk pada kapasitas atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, serta mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan tinggi akan lebih mudah dalam mengelola kelompok dan menciptakan perubahan yang positif.
4. Pengalaman Kerja : adalah hasil dari proses belajar seseorang melalui keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan atau peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Pengalaman membuat seseorang lebih matang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Pemimpin yang berpengalaman cenderung lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi, karena telah terbiasa menghadapi tantangan dan hambatan dalam organisasi.

Adapun menurut H. Joseph Reitz (dalam Ike Hariyati et. al., 2024), terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yakni 1) kepribadian, 2) harapan dan perilaku atasan kepada bawahan, 3) karakteristik, 4) kebutuhan tugas, 5) iklim dan kebijakan organisasi, 6) harapan dan perilaku rekan kerja.

1.2.4 Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa Tahun 2005, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, "Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Menurut Nurcholis (2011), Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa tidak bertindak sebagai "penguasa tunggal", melainkan bekerja bersama perangkat desa lainnya sebagai suatu tim. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, administrasi, serta pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai pamong desa, Kepala Desa memiliki tugas untuk mengayomi, membimbing, dan melayani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selain menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab dalam urusan pemerintahan, seperti menjaga ketertiban dan keamanan, serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa adalah wakil rakyat yang memiliki legitimasi kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah desa.

Dengan demikian, peran Kepala Desa tidak hanya sebatas menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menjadi figur sentral dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang visioner, transformasi, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas.

Menurut Widjaja (2003), kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala Desa Memiliki peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Program pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d) Menetapkan peraturan desa.
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005, Kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

1.2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan melakukan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan sebagai kata benda memiliki tindakan yang terkait dengannya, yaitu "memberdayakan" sebagai kata kerja. Memberdayakan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya. Tujuannya adalah untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan melibatkan pemberian daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Afriansyah, 2023).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Jadi secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya.

Menurut Jim Ife (RW Utami et. al., 2022), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam upaya memengaruhi kehidupan kelompok atau komunitas mereka. Pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang

bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (14)). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?
2. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepemimpinan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khasanah penelitian tentang kepemimpinan di tingkat desa dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa : Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Desa, khususnya di Desa Ajang Pulu, dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk konteks desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pemerintah desa dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan keberhasilan program-program pemberdayaan di masa mendatang.

b) Bagi Masyarakat Desa : Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran serta mereka dalam program-program pemberdayaan. Diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga program-program tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dinamika kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan hasil dan temuan yang diperoleh, peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam, baik dari

segi metodologi maupun konteks, serta mengembangkan teori-teori yang relevan dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, kepemimpinan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Manfaat Metodologis : Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lain yang mempunyai fokus yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan yang mendalam terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi tentang suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada penggunaan metode yang bersifat alami dan holistik, memanfaatkan berbagai pendekatan, dan hasilnya disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Creswell, 2018).

Metode studi kasus dipilih untuk menganalisis secara mendalam objek penelitian, yaitu gaya kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi dinamika kepemimpinan kepala desa dalam proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa berperan dalam keberhasilan program pemberdayaan melalui kebijakan, prosedur, dan interaksi sosial. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti tidak hanya memaparkan fakta tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kepemimpinan kepala desa berperan dalam membentuk dan mengarahkan dinamika internal masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian diperkirakan selama lima bulan.

2.3. Sumber Data

Tabel 2. Sumber Data

Rumusan Masalah	Data yang Dibutuhkan	Sumber Data	Analisis Data
1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?	1. Jenis gaya kepemimpinan yang digunakan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan (direktif, konsultatif, partisipatif, delegatif) 2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan 3. Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa	1. Wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan masyarakat 2. Observasi langsung di lapangan 3. Dokumentasi dan laporan kegiatan desa	1. Data diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Ajang Pulu dalam pelaksanaan program pemberdayaan, observasi di lokasi penelitian, serta pengumpulan dokumen desa yang terkait. 2. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif. 3. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum, dan dipilih sesuai dengan fokus

			penelitian. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi ataupun tabel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ditemukan di lapangan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan data.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone?	- Faktor faktor yang mempengaruhi: pengetahuan, kepribadian, kemampuan, pengalaman kerja kepala desa	- Wawancara dengan informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat desa, dan Ketua BPD	1. Data diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana faktor pengetahuan, kepribadian, kemampuan, dan pengalaman kerja mampu mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa, observasi di lokasi penelitian, serta pengumpulan dokumen

			desa yang terkait. 2. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif. 3. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum, dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi ataupun tabel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ditemukan di lapangan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan data.
--	--	--	--

Sumber Data: Diolah oleh penulis

2.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang diteliti.

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data ini biasanya sudah dipublikasikan atau tercatat dalam berbagai bentuk dokumen atau laporan yang dibuat oleh pihak lain, seperti lembaga pemerintah, organisasi, atau hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis yang lebih mendalam atau untuk memperkaya informasi yang dikumpulkan dari data primer. Data sekunder, dalam penelitian ini, diperoleh melalui telaah pustaka (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan kajian terhadap berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal, dokumen pemerintah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

2.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu yang memiliki banyak informasi terkait objek yang diteliti atau seseorang yang dimintai keterangan ataupun informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010), *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Ajang Pulu
2. Sekretaris Desa Ajang Pulu
3. Kasi Pemerintahan Desa Ajang Pulu
4. Kaur Perencanaan Desa Ajang Pulu
5. Ketua BPD Desa Ajang Pulu
6. Kepala Dusun di Desa Ajang Pulu
7. Masyarakat Desa Ajang Pulu

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.5.1 Wawancara mendalam (*In-depth interview*)

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait gaya kepemimpinan kepala desa, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung, dan hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

2.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk memahami fenomena atau aktivitas tertentu dalam konteks yang alami. Observasi memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang bersifat empiris dan sesuai dengan kenyataan.

2.5.3 Dokumen

Dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder di berbagai literatur dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

2.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena merupakan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat. Fokus penelitian bermanfaat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus dari penelitian ini meliputi :

1. Gaya Kepemimpinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah gaya Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Gatto (Salusu, 1996), yang mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yaitu:
 - Gaya Direktif, Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan berpusat pada pemimpin dan sedikit sajakebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang diizinkan. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya otoriter.
 - Gaya Konsultatif, Gaya ini dibangun atas gaya direktif. Kurang otoriter dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf atau anggota dalam organisasi. Fungsi pemimpin dalam hal ini lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberi nasehat dalam rangka pencapaian tujuan.
 - Gaya Partisipatif, Gaya partisipasi bertolak dari gaya konsultatif, yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka. Sementara itu kontak konsultatif tetap

berjalan terus. Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan dan perhatian diberikan kepada kelompok.

- Gaya Delegasi, Gaya delegasi ini mendorong staf untuk mengambil inisiatif sendiri. Kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan pemimpin, sehingga upaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang terdiri atas pengetahuan, kepribadian, kemampuan, dan pengalaman kerja.

2.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data
Proses ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan hasil reduksi data. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami informasi yang telah dikumpulkan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan ditarik dengan tetap mengacu pada data yang telah diverifikasi untuk memastikan keabsahannya.

Selain itu, untuk menguji keabsahan data dan mendukung penyajian data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber melalui penyusunan tabel triangulasi yang membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian serta memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten dan dapat dipercaya.

2.8 Kerangka Konsep

Penelitian ini akan menganalisis kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, digunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Gatto, yang mencakup empat gaya kepemimpinan, yaitu direktif, partisipatif, konsultatif, dan delegatif. Gaya kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan program tersebut. Faktor-faktor ini mencakup aspek pengetahuan, kepribadian, kemampuan, dan pengalaman kerja.

Dengan memahami hubungan antara gaya kepemimpinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan gaya kepemimpinan yang efektif dapat berkontribusi terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ajang Pulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kepala desa dalam memilih strategi kepemimpinan yang paling sesuai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan. Berikut merupakan kerangka konsep terkait penelitian “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Di Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.”

Bagan 1. Kerangka Konsep

